

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dari pusat perhatian pemerintah Indonesia. Apalagi pada masa-masa sekarang ini yang masih dalam masa pandemi virus covid-19, masyarakat betul-betul membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dari bidang pelayanan kesehatan keberhasilan pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh aparat pemerintahan dalam membuat suatu program ataupun kebijakan. Kebijakan atau program yang sudah dibuat aparat pemerintah akan berjalan dengan baik apabila apabila aparat dapat melayani, membantu, menyikapi, mengurus menyelesaikan keperluan kebutuhan seseorang atau sekelompok orang, dan kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak. Hal ini berdasarkan pada Kurniawan (2005 : 6)

Peran pemerintah dalam memperhatikan kesehatan masyarakat di Indonesia merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui pelayanan publik, sehingga pemerintah telah melakukan segala upaya agar masyarakat Indonesia dapat meraskan hidup makmur, sehat, dan sejahtera. Namun hingga saat ini pelayanan mengenai kesehatan masyarakat masih mengalami kekurangan terutama di bidang kelengkapan sarana dan prasarana, ditambah lagi Indonesia merupakan negara kepulauan yang mungkin masih ada masyarakat yang mungkin sulit untuk dijangkau untuk di berikan

pelayanan di bidang kesehatan yang mungkin saja dialami di beberapa daerah tertentu. Kemiskinan juga merupakan faktor penghambat masyarakat di kalangan bawah sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat jumlah orang miskin di Indonesia pada maret 2021 sudah mencapai 27,54 juta orang jumlah ini membuat tingkat kemiskinan mencapai 10,14 persen dari total populasi nasional. Jika dimabndingkan pada maret 2020 jumlah penduduk miskin meningkat 0,36 persen atau naik 1,12 juta orang ,  
Tribunnews.com ( jumat 16 juli 2021, 07:09 WIB ).

Jaminan sosial merupakan salah satu program jaminan yang hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat dasar dan minimal menjaga harkat dan martabat manusia, jaminan sosial itu meliputi pelyanan seperti pendidikan dasar, kesehatan masyarakat, perumahan masyarakat, air bersih, lingkungan hidup , lanjut usia dan lain sebagainya. Memang pada dasarnya jaminan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah semata agar kemanfaatannya yang vital dapat terealisasi dengan baik,namun perlu juga adanya tanggung jawab dan kerja samanya dengan masyarakat luas. Hal ini didasarkan pada Satrawidjaja (2012).

Program Kartu Badan Penyelenggara Jaminan sosial atau yang disingkat dengan BPJS mepurupakan salah satu program pemerintah dalam membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan di bidang kesehatan, yang dimana program ini membantu dan membuka akses bagi masyarakat misikin agar mendapatkan pelayan kesehatan. Menghadapi masalah kesehatan bukanlah suatu hal yang mudah bagi aparat pemerintah Indonesia yang dimana sebuah kebijakan

yang sudah dirumuskan di implementasikan akan mempengaruhi kebijakan termasuk kebijakan di sektor pelayanan kesehatan yang akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tercatat per 1 oktober 2020 jumlah peserta JKN-KIS masyarakat Indonesia sebesar 223,05 juta jiwa atau sekitar 83 persen dari penduduk Indonesia 2020 yang sebesar 268.58 juta jiwa. Sementara itu di kabupaten Bulungan sendiri tercatat di 3 tahun terakhir yaitu 2018, 2019 dan 2020 masih sangat banyak, di tahun 2018 tercatat 13,03 ribu jiwa mengalami penurunan pada tahun 2019, yaitu 12,40 ribu jiwa namun pada tahun 2020 meningkat kembali jumlah penduduk miskin kabupaten bulungan mencapai 13,08 ribu jiwa berdasar kan data yang ada pada BPS ( Badan Pusat statistik ) Kabupaten Bulungan di jumlah penduduk miskin kabupaten bulungan. Hal ini membuktikan bahwa program Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS sangat di perlukan di semua kalangan masyarakat Indonesia terlebih kalangan masyarakat miskin hal itu juga sudah tercantum pada UU No 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial termasuk program jaminan kesehatan yang bertujuan agar pekerja atau pengusaha memperoleh kesehatan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.

Terlepas dari itu semua dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan memerlukan fasilitas yang memadai sehingga pemberi layanan kesehatan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penerima layanan kesehatan juga dapat merasakan pelayanan yang baik, seperti yang biasa di temukan di bagian perdesaan pelayanan kesehatan dengan mengunakan BPJS masih sering terjadi kendala apabila fasilitas yang ada tidak tersedia di tempat pelayanan kesehatan

tersebut hal ini lah yang sering membuat pelayanan kesehatan kurang maksimal karena masyarakat yang membutuhkan peayanan kesehatan tersebut perlu mencari tempat yang memiliki fasilitas lebih lengkap.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Choiri Suhaila, Drs. Ari Subowo,M.A yang berjudul Implementasi Program BPJS Kesehatan Di Puskesmas Bandarharjo Semarang Utara ,mengungkapkan masalah yang di hadapi dalam implemntasi BPJS diantaranya : Sering terjadi miss komunikasi yang dimana dalam penyampaian mengenai BPJS kesehatan sering terjadi kesalah pahaman antara pemberi dan penerima, Jumlah SDM yang kurang memadai, dan belum adanya SOP kusus untuk pelaksanaan BPJS kesehatan di puskesmas tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang ada penulis mau mengetahui bagaimana pelayanan kesehatan program Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kususnya yang ada di daerah Desa Mara 1, Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan apa saja yang menjadi kendala yang terjadi dalam pemberian layanan kesehatan tersebut dalam upaya memperhatikan kesehatan masyarakat yang ada di Desa Mara 1.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas dapat maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program kartu BPJS dalam pelayanan kesehatan di PUSTU Desa Mara 1 berdasarkan peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehtan...?

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implemntasi program kartu BPJS dalam pelayanan kesehatan di PISTU Desa Mara 1 berdasarkan peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan...?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi program kartu BPJS dalam pemberian layanan kesehatan di Desa Mara 1.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat apa saja yang ada pada implemntasi program BPJS dalam pelyanan kesehatan yang ada di PUSTU Desa Mara 1.

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Akademis.

a. Secara akademis peneliti diharapkan mampu menambah keilmuan dibidang sosial yang mana mampu memberikan kontribusi kepada instansi pemerintahan di semua bidang pelayanan.

b. Penelitian ini juga di harapkan mampu menjadi bahan refrensi bagi peneliti selanjutnya dalam menyusun proposal, skripsi ataupun makalah ilmiah.

2. Manfaat Praktis

a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca baik dari kalangan akademis maupun dari kalangan masyarakat pada umumnya sehingga mengetahui bagaimana Implementasi Program Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam pelayanan kesehatan.

b. Penelitian ini juga secara tidak langsung memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan yang dimana mungkin dapat membantu menjelaskan apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan pelayanan kesehatan melalui Implementasi Program Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).